



PEMILU 1999 DI LAMPUNG

Penyunting

Hertanto

Syarief Makhya

Nanang Trenggono

KERJASAMA

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) NASIONAL

dengan

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)

UNIVERSITAS LAMPUNG

**PENERBIT UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG 2002**

INDONESIA



PARTAI BHINNEKA TUNGGAL

PEMILU 1999 DI LAMPUNG

Penyunting

Hertanto

Syarief Makhya

Nanang Trenggono

Kerjasama

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nasional

dengan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Universitas Lampung

Penerbit Universitas Lampung

Bandar Lampung 2002

Perpustakaan Nasional RI, Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Hertanto, dkk.

Pemilihan Umum 1999 di Lampung

Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2002

xx, 228 halaman: 14,5 x 21 cm

ISBN 979-8287-39-8

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© FISIP UNILA

Penerbit Universitas Lampung

Cetakan Pertama: Mei 2002

PENGANTAR

Kita semua adalah pelaku pemilu yang mempunyai kewajiban untuk mengevaluasi perjalanan Pemilu 1999. Dari apa yang kita lihat semua dalam pelaksanaan Pemilu 1999, kita dapat ekspresikan analisis dan evaluasi kita untuk disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) nasional sehingga bisa menjadi bahan perbaikan bagi pelaksanaan Pemilu 2004. Pemilu 1999 yang telah dilaksanakan jauh lebih bagus, jauh lebih jujur dan adil, bila dibandingkan dengan pelaksanaan-pelaksanaan pemilu selama pemerintahan Orde Baru. Pemilu 1999 mampu merubah paradigma tidak *luber* (langsung, umum, bebas dan rahasia) dalam pemilu Orba menjadi pemilu yang *luber* dan demokratis.

Pemilu 1999 sudah memiliki nilai tambah bagi proses demokratisasi di Indonesia pasca gerakan reformasi mahasiswa dan rakyat Mei 1998 mampu menumbangkan rezim otoriter Orba. Namun, walaupun secara keseluruhan pelaksanaannya sudah cukup baik, masih menyimpan kelemahan-kelemahan. Satu kelemahan pokok dalam Pemilu 1999 adalah dalam proses rekrutmen politik calon wakil rakyat atau populer sebagai pemilihan *caleg* (calon legislatif). Caleg nasional untuk mengisi kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan caleg daerah untuk mengisi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD I dan DPRD II) ternyata secara praksis tidak menghasilkan proses demokrasi yang sehat, karena para wakil rakyat tidak aspiratif, jauh dari rakyat, memenuhi kepentingan sendiri dan tidak mampu memenuhi akuntabilitas politik. Dalam Pemilu 1999 proses rekrutmen caleg banyak dipenuhi oleh unsur-unsur *money politic*, nepotis, dan melanggar syarat-syarat administratif penentuan calon wakil rakyat. Dalam Pemilu 2004 faktor rekrutmen politik harus diperbaiki sehingga mampu menghasilkan caleg yang memenuhi syarat-syarat kualitas politik, integritas dan moralitas individu.

Kami mengucapkan terima kasih kepada KPU Nasional yang telah memberikan kepercayaan kepada FISIP Unila untuk melaksanakan studi evaluatif pelaksanaan Pemilu 1999. Mudah-mudahan hasil evaluasi yang dibukukan ini bisa menjadi acuan positif bagi pelaksanaan pemilu-pemilu yang akan datang menjadi lebih baik lagi dan lebih demokratis.

Rektor Universitas Lampung,
Prof. Dr. Ir. Muhajir Utomo, M.Sc.

DAFTAR ISI

Pengantar	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	3
2. Tujuan	4
3. Pelaksanaan Kegiatan	4
• Tempat dan Waktu Diskusi	4
• Narasumber dan Sub Pembahasan Diskusi	4
• Peserta Kegiatan	5
BAB II EVALUASI PEMILU 1999	7
1. Pelaksanaan Asas-asas Pemilu 1999 (Bambang Sumitro)	9
2. Analisis Data Pemilu 1999 di Lampung di Lampung (Nanang Trenggono)	14
3. Evaluasi Proses Pelaksanaan Pemilu 1999 (Syarief Makhya dan Anshori Djausal)	37
4. Evaluasi Sistem Pemilihan (Ari Darmastuti)	49
5. Penegakan Peraturan Pemilu (Armen Yasir)	54
6. Evaluasi Pengorganisasian, Pendayagunaan Personil, Manajemen Keuangan, Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu (Sutomo)	60
BAB III DESKRIPSI PEMILU 1999	87
1. Sistem Pemilihan Umum (Nanang Trenggono)	90
2. Proses Pelaksanaan Pemilihan Umum (Syarief Makhya)	110
3. Penegakan Peraturan Pemilu 1999 (Armen Yasir)	125
4. Organisasi, Personil, Keuangan dan Logistik Pemilu (Hertanto)	151

BAB IV REKOMENDASI HASIL PEMILU 169
LAMPIRAN..... 179

1. Transkrip Hasil Diskusi
2. Daftar Pelanggaran Pendaftaran Pemilih
3. Daftar Peserta Kegiatan
4. Berita Kegiatan yang Dimuat Koran

4. **ORGANISASI, PERSONIL, KEUANGAN, DAN LOGISTIK PEMILU 1999**

Oleh: **Hertanto***

1. **Organisasi, Personil, Keuangan, dan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu 1999**

Salah satu faktor penentu terhadap suksesnya penyelenggaraan suatu pemilihan umum sangat didukung adanya organisasi penyelenggara pemilu yang handal; personil yang berkualitas dan tidak memihak kepada salah satu partisan; keuangan yang mencukupi; serta dukungan logistik yang memadai dan merata.

Organisasi Penyelenggara Pemilu 1999

Organisasi penyelenggara Pemilu 1999 dievaluasi dari kelemahan dan kelebihan susunan organisasi, pembagian tugas dan kewenangan, hubungan kewenangan, dan kinerja panitia, serta beberapa implikasinya

* Staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Tabel 44

Kelemahan dan kelebihan susunan organisasi, pembagian tugas dan kewenangan, hubungan kewenangan, dan kinerja Penyelenggara Pemilu 1999

Kategori Penilaian	Alasan
Kelebihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Susunan organisasi sudah cukup mendukung pelaksanaan tata kerja 2. Lebih terorganisasi dan lebih mudah dalam pelaksanaan.
Kelemahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian besar personil penyelenggara Pemilu 1999 kurang memahami tugas-tugasnya sesuai dengan tingkat kewenangannya. 2. Koordinasi lemah, PPD II seharusnya secara administratif bertanggung jawab kepada PPD I, keuangan terkoordinasi dengan PPD I, proses perubahan anggaran secara berjenjang, tidak PPD I langsung kepada KPU. 3. Seharusnya ada <i>check and balance</i> antara PPD dengan Panwas. 4. Anggota PPD terdiri partai politik, sehingga dalam pengambilan keputusan terkesan ada kepentingan dan intervensi partai, bukan kepentingan nasional. Contoh: Berlarut-larutnya penetapan hasil pemilu, kecurangan dalam pendaftaran pemilih dan perhitungan suara, serta penetapan caleg yang tidak objektif. 5. Pembagian tugas dan kewenangan masing-masing unit masih banyak kerancuan. 6. Kurang independen.

Keterangan: Jawaban ganda

Nampaknya masalah koordinasi antarjenjang organisasi menjadi kelemahan yang perlu menjadi perhatian di masa-masa mendatang. Hubungan kewenangan perlu lebih diperjelas dalam skema tugas, pokok, dan fungsi setiap bagian. Personil dalam keanggotaan PPD, terutama dari partai politik, dianggap belum mampu mengedepankan independensi bagi pemilu yang jujur dan luber.

Tabel 45

Sinyalemen terhadap ketidakjelasan garis perintah di antara penyelenggara Pemilu 1999 sebagai penyebab proses perhitungan dan penetapan calon terpilih yang terlalu lama

Kategori Penilaian	Alasan
Setuju	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karena keputusan KPU sering berubah-ubah dalam waktu yang relatif singkat. 2. Masih terdapatnya garis perintah yang tidak jelas antara KPU dengan PPI sehingga mengakibatkan perbedaan persepsi di daerah. 3. Karena adanya <i>stambus accord</i>. Sebaiknya <i>stambus accord</i> dihapus sehingga penetapan caleg terpilih cukup berdasarkan rangking perolehan suara.
Tidak setuju	<ol style="list-style-type: none"> 1. Justru karena adanya peraturan yang tidak konsisten sehingga menyebabkan terjadinya "plesetan-plesetan" dalam perhitungan suara dan penetapan calon terpilih. 2. Karena pelaksanaan penghitungan suara ditingkat TPS, PPS, PPK, dan PPD II sudah tepat waktu. Untuk tingkat nasional lamanya penghitungan suara dan penetapan calon terpilih karena adanya faktor alam dan faktor kepentingan anggota PPI dan KPU.

Responden cenderung setuju terhadap anggapan bahwa ketidakjelasan garis perintah diantara penyelenggara Pemilu 1999 sebagai penyebab proses perhitungan dan penetapan calon terpilih yang terlalu lama. Ketidakjelasan ini terutama berhubungan dengan sering berubah-ubahnya keputusan KPU dalam waktu yang berdekatan. Untuk panitia daerah, hal itu dianggap sangat merepotkan dan mengganggu kinerja panitia daerah.

Tabel 46
Saran untuk memperbaiki struktur organisasi dan kinerja penyelenggara pemilu

No.	Saran-saran
1.	Struktur sederhana dengan penyelenggara yang independen, serta mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan pemilu.
2.	Anggota PPD jangan dari partai politik.
3.	Peraturan mulai dari UU Pemilu, PP, dan keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh KPU tidak saling bertentangan.
4.	Panwas tidak efektif sehingga perlu diganti dengan Peradilan Pemilu, seperti Peradilan HAM sekarang.
5.	Anggota KPU dan KPU Daerah hendaknya terdiri dari personil yang nonpartisan, seperti akademisi dan aktivis LSM.
6.	Perlu perincian tugas yang jelas untuk tiap unit dan pelaksana.
7.	Sekretariat hendaknya melibatkan birokrat dan masa tugasnya permanen.
8.	Tugas Sekretariat sebaiknya satu komando di bawah PPD.
9.	Jangan ada rangkap wewenang dan tugas
10.	Transparansi dalam tugas dan biaya.
11.	Perlu ada ahli statistika di PPD untuk proses perhitungan suara.

Keterangan: Jawaban ganda

Perlunya perincian tugas yang jelas untuk tiap unit dan pelaksana, dan independensi personil penyelenggara pemilu merupakan saran paling menonjol yang dianggap bisa memperbaiki kinerja penyelenggara pemilu yang akan datang. Di samping itu, masalah rangkap jabatan dan kejelasan tugas sekretariat perlu menjadi perhatian.

Tabel 47

Perlu atau tidaknya dibentuk pelaksana pemilu yang permanen di tingkat provinsi dan kabupaten/kota

Kategori Penilaian	Alasan (kalau ada)
Perlu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karena pemilu dilaksanakan secara rutin setiap 5 tahun sekali, bahkan bisa dipercepat, sehingga panitia bisa memelihara data-data pemilu lebih tertib, dan menyiapkan pelaksanaan pemilu lebih awal. 2. Perlu, agar pemilu berikutnya bisa sukses. 3. Perlu tetapi masa waktunya tidak melebihi masa tugas KPU di atasnya. 4. Perlu agar PPD lebih siap.
Tidak perlu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak perlu 2. Tidak perlu tetapi data pemilu yang ada sesuai dengan tugas pokok tetap ditangani oleh Dinas Kesatuan Bangsa (dulu Kantor Direktorat Sosial dan Politik).

Penyelenggaraan pemilu yang dilakukan secara periodik membawa konsekuensi bahwa diperlukan adanya panitia penyelenggara pemilu yang permanen dari tingkat pusat sampai ke daerah. Adanya lembaga penyelenggara pemilu yang permanen bermanfaat bagi pemeliharaan data-data dan dokumen pemilu sebelumnya; dan panitia pelaksana pemilu akan lebih mempersiapkan diri sejak awal tentang segala tugas dan kewajiban yang harus dikerjakannya.

Tabel 48

Anggapan Sekretariat penyelenggara Pemilu 1999 lebih bertanggung jawab kepada pemerintah daripada kepada penyelenggara pemilu (KPU, PPI, PPD I, DPD II, dan PPK)

Kategori Penilaian	Alasan
1	2
Benar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibidang keuangan, sekretariat <u>hanya</u> bertanggung jawab kepada pemerintah 2. Karena menyangkut hal keuangan dan pengeluarannya harus didasarkan pada aturan-aturan. Sementara anggota PPD kurang paham masalah itu.

Tabel 48 (lanjutan)

1	2
Tidak benar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karena Sekretariat sifatnya membantu tugas PPD II 2. Kecuali tanggung jawab keuangan, karena pemilu dibiayai oleh APBN (pemerintah) bukan oleh KPU/PPI.

Sebagian besar responden (57,14%) beranggapan bahwa pada Pemilu 1999, Sekretariat DPD bertanggung jawab kepada penyelenggara pemilu, bukan kepada pemerintah. Namun dalam hal administrasi keuangan, sekretariat bertanggung jawab kepada pemerintah (karena dana berasal dari APBN).

Personil Penyelenggara Pemilu 1999

Personil Penyelenggara Pemilu 1999 dievaluasi dari komposisinya, sumber rekrutmen, kemampuan teknis, kinerjanya, dan kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi.

Tabel 49

Kelebihan dan kelemahan sekretariat penyelenggara pemilu yang personilnya berasal dari jajaran birokrasi

Kategori Penilaian	Alasan
1	2
Kelebihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lebih berpengalaman dan mudah mempertanggungjawabkan keuangan pemilu. 2. Rata-rata personilnya telah berpengalaman 3. Memiliki SDM dan fasilitas sarana/prasarana administrasi sehingga memungkinkan adanya efisiensi.
Kelemahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sering dinilai lebih berpihak kepada partai tertentu atau partai yang sedang berkuasa. 2. Pelaksanaan tugas penyelenggara pemilu tidak penuh 100% karena adanya jabatan rangkap dengan struktural kedinasan. 3. Loyalitasnya mendua (ganda). 4. Unsur kepentingan lebih kental. 5. Kurang profesional dalam melaksanakan tugas.

Keterangan: Jawaban ganda

Kelebihan sekretariat penyelenggara Pemilu 1999 yang personilnya berasal dari jajaran birokrasi adalah kemampuan dan pengalaman administrasi yang dimilikinya, paling tidak sebagai penyelenggara pemilu-pemilu sebelumnya. Sedangkan kelemahannya dinilai tidak netral karena pengalaman pemilu di masa-masa Orde Baru, instansi-instansi pemerintah yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu senantiasa tidak netral dan berpihak kepada partai yang sedang berkuasa.

Tabel 50

Saran untuk mengatasi kelemahan tersebut di atas

No.	Saran-saran
1.	Kurangi personil dari jajaran birokrasi
2.	Sekretariat hendaknya berasal dari non birokrasi dan independen.
3.	Sekretariat bertanggung jawab kepada panitia pemilu.
4.	Perlu adanya pelatihan untuk pelaksanaan tugas-tugasnya.
5.	Masa tugas sekretariat hendaknya 1 tahun.
6.	Pejabat birokrasi yang terlibat dalam PPD sebaiknya melimpahkan kepada bawahannya, dan hanya melakukan tugas kontrol saja.
7.	Lembaganya permanen dan tenaganya profesional.

Keterangan: Jawaban ganda

Sekretariat penyelenggara pemilu masih menjadi pro-kontra bila dikaitkan dengan sumber rekrutmen personil untuk mengisi lembaga tersebut. Sebagian responden beranggapan bahwa sekretariat sebaiknya berasal dari birokrat, dan sebagian yang lain personil dari non birokrasi memiliki kelebihan karena netralitasnya. Namun, mereka diragukan kemampuan administratif dan pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu.

Tabel 51

Anggapan bahwa sekretariat penyelenggara pemilu yang non birokrasi akan mempunyai kinerja yang lebih baik

Kategori Penilaian	Alasan
1	2
Setuju	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setuju dengan dibekali bimbingan tentang kesekretariatan pemilu 2. Setuju dengan mendapatkan pelatihan yang memadai/baik. 3. Setuju
Tidak setuju	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tentu 2. Justru akan buruk karena tidak berpengalaman dibidang administrasi dan pemerintahan. 3. Karena di daerah sulit mendapatkan SDM yang dibutuhkan dan memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu. 4. Karena belum siapnya SDM dan akan sulit mengawasinya.

Sebagian besar responden (71,42%) juga beranggapan bahwa tidak semua daerah terdapat personil nonbirokrasi yang memiliki kemampuan dan pengalaman teknis pemilu (Tabel 52).

Tabel 52

Anggapan bahwa semua daerah terdapat personil non birokrasi yang memiliki kemampuan dan pengalaman teknis pemilu

Kategori Penilaian	Alasan	%
Setuju	1. Semua daerah memiliki	14,29
Tidak setuju	2. Berasal dari kalangan akademisi dan aktivis LSM setempat.	14,29
	Tidak semua daerah memiliki	71,42
	Jumlah	100,00

Tabel 53

Kelebihan, kelemahan, dan kesalahan personil pelaksana Pemilu 1999

Kategori Penilaian	Alasan
1	2
Kelebihan	<ol style="list-style-type: none">1. Personilnya diambil dari birokrasi yang siap bekerja2. Sifat egonya tinggi sehingga mempunyai rasa idealisme dan keputusan dapat lebih objektif3. Personil sekretariat PPD cukup baik.4. Personil karena berasal dari wakil parpol maka lebih mendukung asas demokrasi
Kelemahan	<ol style="list-style-type: none">1. Terlalu banyak personil sehingga sulit untuk mengambil keputusan2. Personil masih menggunakan ego parpol sehingga pengambilan keputusan berlarut-larut3. Anggota PPD wakil parpol terdapat intervensi dalam penentuan caleg4. Personil wakil parpol belum berpengalaman5. Waktu pelaksanaan yang terburu-buru membuat hasil kerja kurang maksimal
Kesalahan	<ol style="list-style-type: none">1. Terlalu mementingkan pribadi atau partainya2. Kesalahan penghitungan pengemasan kartu suara ke dalam kotak suara pada tiap-tiap TPS3. Kesalahan penjumlahan, penulisan, dan perekapan penghitungan suara4. Keterlambatan pengiriman hasil penghitungan su-ara ke PPD II dan seterusnya5. Dalam penelitian berkas para calon anggota DPRD II masih besar intervensi wakil parpol yang ada di PPD II dan tidak konsekuennya penetapan DCS dan DCT (daftar calon tetap)

Keterangan: Jawaban ganda

Responden beranggapan bahwa kelebihan personil pelaksana Pemilu 1999 adalah karena sebagian dari panitia berasal dari birokrasi yang sudah cukup pengalaman. Sedangkan kelemahannya karena keterlibatan personil yang berasal dari

partai politik yang belum berpengalaman. Hal ini menimbulkan terjadinya kesalahan-kesalahan penjumlahan, penulisan, dan perekapan penghitungan suara; serta keterlambatan pengiriman hasil penghitungan suara ke PPD; dan kesalahan penelitian berkas para calon anggota DPRD.

Tabel 54

Kelebihan dan kelemahan program peningkatan kemampuan teknis personil mulai dari sekretariat PPD I, PPD II, dan PPK sampai pada Pantarlih, PPS, KPPS

Kategori Penilaian	Alasan
1	2
Kelebihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemilu mencapai target sukses yang maksimal 2. Proses pemilu yang luber dan jurdil dapat dipertanggungjawabkan 3. Personil menjadi lebih profesional 4. Adanya peningkatan pengetahuan teknis personil 5. Meningkatnya kemampuan personil dalam memahami dan melaksanakan tugas-tugasnya. 6. Panitia lebih siap melaksanakan tugas 7. Pelaksanaan pemilu dapat lebih lancar dan tepat waktu
Kelemahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu sangat terbatas sehingga pemahaman teknis dirasakan belum memenuhi sasaran. 2. Memakan dana yang besar dan waktu yang lama 3. Belum jelas siapa yang berhak duduk dipanitia pemilu

Keterangan: Jawaban ganda

Kelebihan program peningkatan kemampuan teknis personil penyelenggara Pemilu 1999 meliputi meningkatnya pengetahuan teknis personil; meningkatnya kemampuan personil dalam memahami dan melaksanakan tugas-tugasnya; serta personil lebih siap dan lebih profesional dalam melaksanakan tugas. Sedangkan, kelemahannya adalah waktu yang terlalu mendesak.

Tabel 55

Saran untuk meningkatkan kemampuan teknis

No.	Saran-saran
1.	Perlu ada pelatihan/pendidikan teknis tentang pemilu bagi personil sekretariat maupun nonsekretariat.
2.	Perlu dibentuk panitia pemilu lebih awal.
3.	Perlunya pemahaman tentang sistem pemilu; prosedur tata kerja; cara-cara dan teknis penyebaran peralatan pelaksanaan pemilu.
4.	Diperlukan waktu yang cukup bagi personil untuk memahami tugas-tugasnya sehingga tidak merasa dikejar-kejar waktu.

Keterangan: Jawaban ganda

Untuk meningkatkan kemampuan teknis personil penyelenggara pemilu, perlu ada pelatihan/pendidikan teknis tentang sistem pemilu; prosedur tata kerja; cara-cara dan teknis penyebaran peralatan pelaksanaan pemilu.

Anggaran Penyelenggaraan Pemilu 1999

Anggaran Penyelenggaraan Pemilu 1999 dievaluasi dari alokasi anggaran, dan kecukupan anggaran pada pos-pos tertentu.

Tabel 56

Kelebihan dan kelemahan alokasi anggaran pelaksanaan pemilu 1999

Kategori Penilaian	Uraian Penilaian
1	2
Kelebihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada pos tertentu terjadi kelebihan dana, seperti dana saksi, dimana setiap PPS dan PPK jumlahnya berbeda karena tergantung keberadaan parpol 2. Secara umum, dana sangat mencukupi untuk penyelenggaraan pemilu

Tabel 56 (lanjutan)

1	2
Kelemahan	<ol style="list-style-type: none">1. Alokasi pengadaan kotak suara hendaknya terdapat di PPD I sehingga ada keseragaman2. Alokasi dana pelatihan untuk panitia di TPS hendaknya jauh hari sudah dicairkan3. Alokasi dana pada beberapa pos jumlahnya relatif kecil dan tidak sesuai dengan beban tugas, seperti ATK, operasional lapangan, honor dan uang lembur.4. Pencairan dana dari KPU sering terlambat sehingga menghambat tugas5. Droping dana terpaku pada satu bank yaitu BNI Bandar Lampung, sehingga riskan terhadap keamanan.6. Alokasi dana untuk honor personil sekretariat sangat tidak mendukung7. Anggaran untuk penghitungan suara perlu ditingkatkan

Keterangan: Jawaban ganda

Alokasi anggaran penyelenggaraan Pemilu 1999, secara umum, sangat mencukupi dan memadai. Adapun kelemahannya, ada beberapa pos tertentu yang dianggap porsi nya perlu lebih ditingkatkan (ATK, TPS) dengan mengurangi pos yang berlebihan. Sedangkan mekanisme pencairan anggaran perlu diperbaiki dalam hal waktu agar tidak terlambat dan kemudahan pencairan yang terkait dengan bank. Disarankan untuk menggunakan BRI yang telah memiliki cabang sampai di tingkat desa.

Tabel 57

Alokasi anggaran untuk kegiatan operasional di TPS tidak memadai, tetapi alokasi anggaran untuk honorarium anggota PPD I dan II lebih diprioritaskan

Kategori Penilaian	Alasan	%
Benar	1. Tetapi honor PPD I dan II lebih diprioritaskan juga tidak benar	14,28
	2. Hendaknya setiap personil di TPS mendapatkan honor	42,86
Tidak benar	Sudah sangat memadai, tetapi perlu kontrol agar dana sampai seutuhnya	42,86
	Jumlah	100,00

Sebagian besar responden (57,14%) sepakat bahwa alokasi anggaran untuk kegiatan operasional di tempat pemungutan suara (TPS) perlu ditingkatkan untuk waktu yang akan datang. Namun, sebagian responden lainnya beranggapan dana sudah cukup memadai, hanya diperlukan kontrol yang lebih baik.

Tabel 58

Saran untuk perbaikan anggaran

No.	Saran-saran
1.	Alokasi anggaran perlu proporsional.
2.	Transparansi dan pengawasan alokasi perlu ditingkatkan.
3.	Distribusi dana lebih efektif melalui BRI, karena di semua tingkat daerah ada.
4.	Adanya waktu yang cukup untuk distribusi dan pertanggungjawaban dana pemilu.
5.	Anggaran pada pos ATK, operasional, honor/lembur perlu disesuaikan dengan beban tugas.
6.	Honor anggota PPD I dan Sekretariat PPD I ditingkatkan.

Keterangan: jawaban ganda

Perlunya distribusi dana lebih awal dan mudah dalam pencairannya (misalnya melalui BRI bukan BNI) sehingga lebih memperlancar tugas-tugas panitia di tingkat daerah.

Logistik Pelaksanaan Pemilu 1999

Logistik Pelaksanaan Pemilu 1999 dievaluasi dari prosedur dan mekanisme pengadaan, serta distribusi logistik ke daerah-daerah.

Tabel 59

Kelebihan dan kelemahan prosedur dan mekanisme pengadaan logistik pelaksanaan pemilu 1999 (kertas, surat suara, kotak suara, tanda gambar, tinta, bendera, komputer, mobil, dll)

Kategori Penilaian	Alasan
1	2
Kelebihan	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya logistik telah memperlancar pelaksanaan kegiatan Pemilu 19992. Kertas, surat suara, dan tinta hendaknya tetap secara sentral diadakan oleh KPU, selebihnya diserahkan kepada daerah
Kelemahan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat suara tidak dilipat2. Terlalu banyak tanda gambar3. Jumlah bahan tidak sesuai dengan jumlah pemilih4. Tidak tepat waktu5. Tidak ditunjang sarana yang memadai6. Pengadaan logistik masih sentralistis7. Tinta tidak memenuhi standar8. Logistik sebaiknya disiapkan jauh sebelum pemilu9. Pertencanaan dan pendataan oleh PPI dan KPU kurang tepat10. Distribusi kertas dan surat suara yang terlambat atau tidak sampai ke PPD II menghambat pelaksanaan pemilu11. Untuk wilayah yang jauh dan sulit transportasi pengadaan logistik sering/ditakutkan terlambat

Keterangan: jawaban ganda

Tabel 60

Pengadaan logistik Pemilu 1999 di daerah ditandai oleh praktik KKN

Kategori Penilaian	Alasan (kalau ada)	%
Benar	Terutama pada pengadaan kotak suara, yaitu sistem tender dengan rekanan oleh sekretariat.	14,29
Tidak benar	Karena dilakukan secara transparan melalui panitia tender	71,42
Tidak menjawab	-	14,29
	Jumlah	100,00

Sebagian besar responden (71,42%) menyatakan tidak terjadinya praktik KKN dalam pengadaan logistik Pemilu 1999 di daerah Lampung (Tabel 60). Namun, responden berpendapat bahwa dalam pengadaan logistik tersebut masih bersifat tertutup dan sentralistis, karena tidak melibatkan daerah untuk pengadaan logistik tertentu yang lebih mudah dan efisien (Tabel 61).

Tabel 61

Pengadaan logistik Pemilu 1999 terlalu tertutup dan sentralistis

Kategori Penilaian	Alasan (kalau ada)	F
Benar	Karena pengiriman logistik dari KPU tidak sesuai dengan permintaan daerah	71,42
Tidak benar	1. Karena sudah disesuaikan dengan kemampuan yang ada di daerah	14,29
	2. Hanya kurang koordinasi	14,29
	Jumlah	100,00

Tabel 62

Saran-saran untuk memperbaiki kelemahan logistik

No.	Saran-saran
1.	Perlu aturan-aturan yang jelas untuk pedoman di daerah.
2.	KPU hendaknya lebih terbuka.
3.	Untuk logistik tertentu akan lebih efisien bila pengadaannya di daerah.
4.	Surat suara dan tinta masih perlu dilaksanakan secara sentral oleh KPU.
5.	Pengadaan logistik harus tepat waktu.

Keterangan: Jawaban ganda

Tabel 63

Logistik Pemilu 1999 diterima tepat waktu, dalam jumlah yang cukup, dan dengan kualitas yang sesuai dengan standar

Kategori Penilaian	Alasan
Benar	Hanya kualitas tinta yang perlu diperbaiki
Tidak benar	1. Belum tepat waktu 2. Masih ada kekurangan bahan seperti kertas suara, hologram, tinta ada yang palsu, peralatan KPPS

Keterangan: Jawaban ganda

Sebagian besar responden (66,67%) beranggapan bahwa logistik Pemilu 1999 diterima tidak tepat waktu, jumlah tidak mencukupi, dan kualitas belum sesuai dengan standar (Tabel 63). Keterlambatan datangnya logistik berupa kartu pendaftaran dianggap paling menonjol. Bahan seperti tinta dianggap tidak mencukupi dan kualitasnya kurang baik.

Tabel 64

Kelebihan dan kelemahan pola dan sistem distribusi logistik Pemilu 1999

Kategori Penilaian	Alasan
Kelebihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya keseragaman 2. Bahan cepat sampai 3. Sentralisasi lebih aman
Kelemahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memerlukan biaya tambahan bila daerah kekurangan bahan 2. Koordinasi lemah yang mengakibatkan distribusi tidak lancar 3. Kecukupan jumlah dan waktu pengiriman belum baik 4. Terlalu sentralistis sehingga sering terlambat atau tidak tepat waktu

Keterangan: Jawaban ganda

Kelebihan pola dan sistem distribusi logistik Pemilu 1999 pada sentralisasi oleh panitia pusat yang menyebabkan adanya keseragaman bahan dan kualitasnya. Namun kelemahannya, terutama pada waktu pengiriman yang lambat dan jumlah yang belum memadai.

Sebagian besar responden (57,14%) juga beranggapan bahwa sistem distribusi logistik Pemilu 1999 belum cocok dengan kondisi wilayah Indonesia yang berupa kepulauan.

Tabel 65

Saran-saran untuk mengatasi kelemahan distribusi logistik Pemilu 1999

No.	Saran-saran
1.	Distribusi harus mempertimbangkan jarak dan lokasi daerah
2.	Perlu adanya kontrol terhadap jalur distribusi
3.	Perlu adanya koordinasi dari KPU kepada PPD I dalam setiap distribusi
4.	Perlu perbaikan data, perencanaan, dan waktu pengiriman
5.	Distribusi perlu dilakukan secara bertahap: KPU-PPD I-PPD II-PPK

Keterangan: Jawaban ganda

REKOMENDASI

A. Organisasi

Organisasi pelaksana pemilu hendaknya disusun secara sederhana dengan tanggung jawab berjenjang dari pusat ke daerah; rincian tugas yang jelas untuk setiap unit; dan perlu dibentuk organisasi pelaksana pemilu secara permanen, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

B. Personil

Komposisi personil pelaksana pemilu hendaknya merupakan perpaduan antara kelompok independen dan birokrat yang mempunyai pengalaman teknis administratif sebagai penyelenggara pemilu sebelumnya. Kelompok independen ini bisa dipertimbangkan dari kalangan akademisi yang memiliki kemampuan teoritis kepemiluan, serta kalangan aktivis LSM yang memiliki kredibilitas. Kelemahan kelompok independen dalam hal pengalaman dan kemampuan teknis bisa ditingkatkan melalui program pelatihan yang dirancang oleh panitia pusat.

C. Keuangan

Alokasi anggaran penyelenggaraan Pemilu 1999, secara umum, sangat mencukupi dan memadai. Adapun kelemahannya, ada beberapa pos tertentu yang dianggap porsiya perlu lebih ditingkatkan (ATK, TPS) dengan mengurangi pos yang berlebihan. Sedangkan mekanisme pencairan anggaran untuk waktu yang akan datang perlu diperbaiki dalam hal waktu agar tidak terlambat dan kemudahan pencairan yang terkait dengan bank. Disarankan untuk menggunakan BRI yang telah memiliki cabang sampai di tingkat desa.

D. Logistik

Pola sentralistis perlu dipertimbangkan untuk ditinjau kembali oleh panitia pemilu pusat, terutama untuk mengantisipasi kelambatan dalam distribusi logistik. Sentralisasi bisa dilaksanakan untuk bahan yang tidak ada di daerah seperti kartu pendaftaran, kartu suara, dan tinta yang berkualitas.

Distribusi Logistik juga perlu mempertimbangkan jarak dan lokasi daerah. Untuk wilayah yang jauh dan sulit transportasi, pengadaan logistik sebaiknya disiapkan jauh hari sebelumnya.